

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Balfas, Hamud, M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hadhikusuma, Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Prasetya, Rudhi, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Airlangga University Pers, Surabaya, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti PePers, Jakarta, 2007.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 34, PT. Aka, Jakarta, 2004.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroa Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa.

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2178 K/Pdt/2008.